Pemerintah
Kabupaten Majalengka

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

SEKRETARIAT DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Jln. Jenderal Achmad Yani
No. 01 Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Kabag Pk	
Kabag Organisasi	
Kabag KBJ	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum	
Kabag Ekbang	
Kabag Kesra	
Kabag Prokompim	
Kabag Umum	

Majalengka, 27 Februari 2026

Sekretaris Daerah

Kabupaten Majalengka

AERON RANDI, AP.,MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19750209 199311 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Indeks Nilai RB General dapat didefinisikan melalui Hasil Penilaian RB General. RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.

Capaian Indeks Nilai RB General adalah 119,40% dari taget 64 dan realisasi 76,42.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi tersebut yaitu Rp 4.416.675.045 karena hanya satu indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

i — Kata Pengantar

ii — Ringkasan Eksekutif

iii — Daftar Isi

01 — BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

08 — BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

12 — BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

37 — BAB IV Penutup

39 — Lampiran

01

PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh Staf ahli yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati. Staf Ahli terdiri dari :

a. Staf Ahi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan keuangan;
c. Staf Ahli Bidang Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan.

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang pemerintahan, hukum dan politik, bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, serta bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. Bagan struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 70 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

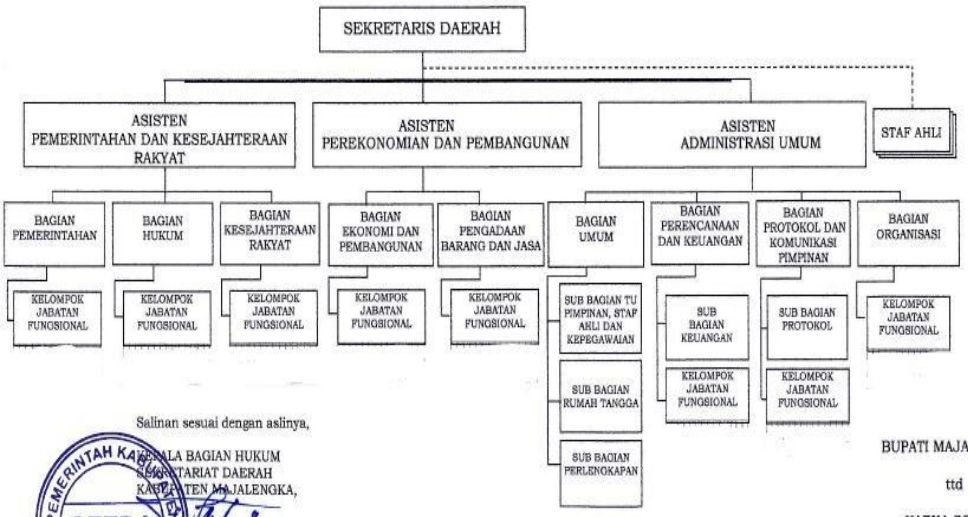

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Infografik ASN

SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTURAL	FUNSIONAL	PELAKSANA
21	55	74

GENDER :

Total **150**

97 LAKI-LAKI

53 PEREMPUAN

ESELON :

II B	III A	III B	IV A	IV B
6	9	-	5	-

GOLONGAN

	I	II	III	IV
PNS	...	11	114	17
PPPK	...	...	8	

PENDIDIKAN

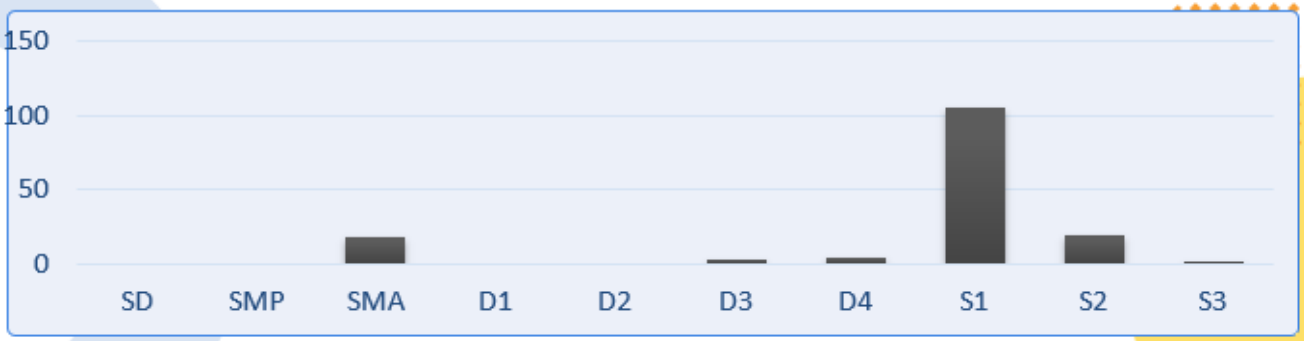

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 150 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin

Perempuan: 53 Orang

Laki-laki: 97 Orang

b. Eselon

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Eselon

Eselon II a: 1 Orang

Eselon II b: 6 Orang

Eselon III a: 9 Orang

Eselon III b: -

Eselon IV a: 5 Orang

Eselon IV b: -

d. Golongan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah bedasarkan Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	11	114	17
PPPK	-	-	8	

e. Jenis Jabatan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 7 Orang

Jabatan Administrator: 9 Orang

Jabatan Pengawas: 5 Orang

Jabatan Fungsional: 55 Orang

Jabatan Pelaksana: 74 Orang

f. Pendidikan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
-	-	18	-	-	3	4	105	19	1

1.3 Isu Strategis

Pada Sekretariat Daerah terdapat beberapa isu strategis yang dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. Isu strategis tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan telaahan dari dokumen-dokumen pendukung.

Adapun isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan kesejahteraan sosial dan Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum;
4. Meningkatnya Kualitas Kebijkan Bidang Perekonomian;
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Pelaporan dan Pengukuran;
7. Organisasi Agile;
8. Meningkatnya PD Yang Menerapkan Standar Kerja dan Sistem Kerja Sederhana;
9. Diterapkannnya Budaya Kerja;
10. Meningkatnya PD yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik;
11. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Sekretariat Daerah;

Oleh karena itu, pada Sekretariat Daerah ditetapkan Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV **Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Daerah serta SK Tim Penyusunan LKIP.

02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut.

Rencana strategis Sekretariat Daerah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang disusun berdasarkan pada isu strategis di lingkungan Sekretariat Daerah dan sudah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerh (RPD)

Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Setelah adanya reviu maka terdapat perubahan pada Sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Adapun ringkasan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tujuan
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah

Sasaran
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi

Indikator
Nilai RB General

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	-	-	-
		Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	Nilai	63	64	65	63	73	65

Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi mengalami perubahan dikarenakan Realisasi Tahun sebelumnya tercapai melampaui ditas target yang sudah ditentukan serta sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi LKIP Tahun 2024. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 64 menjadi 73, naik 9 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Nilai RB General 114,89 tiga tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	64

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	73

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.198.734.818	70,75
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.491.087.550	26,06
Perekonomian dan Pembangunan	2.264.465.215	3,19
Total	70.954.287.583	100,00

03

AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangungan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 104,68%.
capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

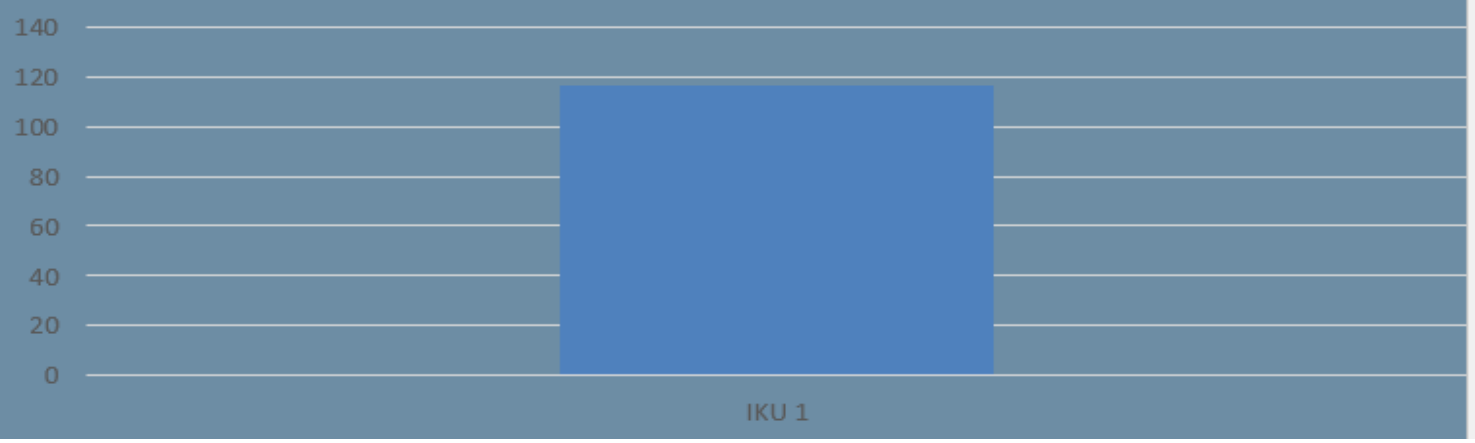

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 104,68% dengan realisasi 76,42 dari target 73.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	73	76,42	104,68%

*warnai kolom pada **capaian** yang tidak mencapai 100%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN : Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka memperhatikan tugas fungsi sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai Perangkat Daerah, dimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan administratif pelaksanan tugas dinas daerah, badan daerah dan kecamatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta membina administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berkontribusi dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah terutama Misi ke satu dan ke tiga.

Untuk menjawab isu strategis Sekretariat Daerah dan mewujudkan tujuan Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima, Nilai RB General merupakan Indikator Kinerja dari Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.

Dalam pendeketan ini Nilai RB General dihitung dengan menggunakan formula : hasil penilaian RB General.

IKU 1

NILAI RB GENERAL

Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi

Capaian Tahun 2025

104,68%

Target	Realisasi
73	76,42

Realisasi Tahun 2024
72,38

Target Akhir RPD
65

Capaian Tahun 2024
113%

Realisasi Provinsi/Pusat
88,89

Faktor yang Mempengaruhi

peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas kebijakan kesejahteraan Sosial dan Masyarakat, peningkatan kualitas kebijakan bidang perekonomian, peningkatan kualitass pelayanan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan dan pengukuran, Organisasi yang agile, peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja sederhna, peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan publik, peningkatan Reformasi Hukum, dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum Sekretariat Daerah

Program yang Mendukung

- Program Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat
- Program Ekonomi dan Pembangunan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai RB General pada sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi yaitu 5,94% atau sebesar Rp. 4.416.675.045 dari pagu anggaran Rp. 70.954.287.583 dengan realisasi Rp. 66,537.612.538,-

Tren Nilai RB General

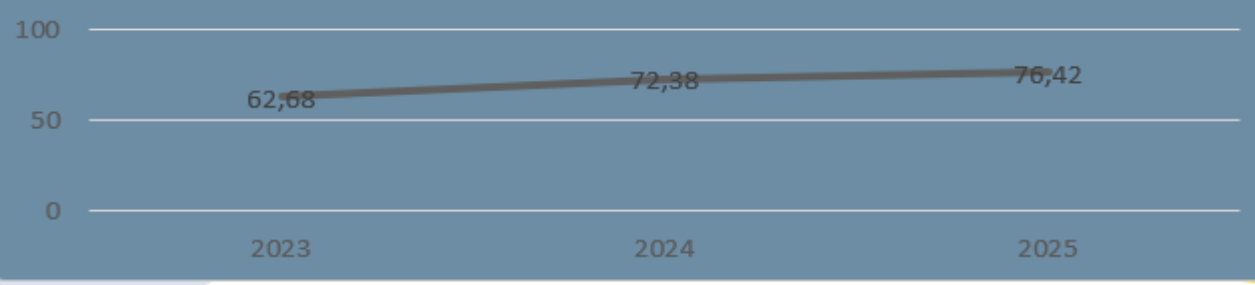

INDIKATOR

Nilai RB General

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	73	76,42	104,68%

Secara umum, pelaksanaan RB General dibagi kedalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reormasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian / lembaga / pemerintah daerah untuk dapat mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2025 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama utuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka diciptakan kebijakan percepatan dalam RB General. Kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB tematik. Pada kebijakan percepatan terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif dan adaptif.

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama untuk periode 2020-2025, yaitu :

1. Percepatan transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile.

   Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi". Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas sekat-sekat yang mengahambat koordinasi antar instansi. Kabupaten Majalengka sendiri sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi pada Tahun 2021 dengan adanya penyederhanaan jabatan bagi jabatan pengawas yang dialihkan menjadi jabatan fungsional (JF).
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah " Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional". Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan

birokrasi. Transformasi jabatan fungsional ditujukan agar Jabatan Fungsional lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja organisasi yang agile, lebih kolaboratif, fleksibel dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi. Percepatan transformasi jabatan fungsional di Kabupaten Majalengka sudah di implementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Bagi Perangkat Daerah Pasca Penyederhanaan Birokrasi.

Percepatan Transformasi squad model. Sasaran dari kebijakan ini adalah " terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN".Melalui sistem kerja baru yang berbass squad team, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN bisa bekerja lintas unit bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sudah diterapkan di Kabupaten Majalengka. Dalam penyusunan proses bisnis juga terdapat *cross cutting* sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang saling beririsan dapat terpetakan dengan baik. Pada Sekretariat Daerah sudah dibentuk tim kerja yang ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah.

3. Percepatan implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps layanan digital pemerintah terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah "terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional " yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital Pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain.

4. Percepatan implementasi manajemen talenta dan mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah " terselengaranya Manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien". Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja agile yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi pembangunan talenta, penyiapan talent pool, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi tlenta dan strategi suksesi yng baik.
5. Penguatan kerja kolaboratif berbasis kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah " Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang

   terintegrasi, berbasis teknologi Informasi yan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah". Kabupaten Majalengka sudah mengimplementasikan Sitem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui Peratura Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis teknologi informasi diimplementasikan dengan adanya aplikasi E Sakip yang dikelola oleh bagian Organisasi Setda.
6. Optimalisasi MPP dan MPP digital Services. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terbangunnya Pelayanan ublik Digital *(Digital Services)",* yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu,

biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025 Kabupaten Majalengka telah mengoftimalkan MPP (Mall Pelayanan Publik) .terpadu dan berbasis digital.

7. Penguatan pengawasan dengan *four line of defense.* Sasaran dari kebijakan ini adalah "meningkatnya kualitas pengawasan". Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh berbagai unsur, yang terdiri dari pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.
8. Penguatan kebijakan publik berbasis bukti dengan *big data* dan *artificial intelligent.* Muara dari pemanfaatan teknologi adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik yang berbasis pada kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah " meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi", dimana setiap kebijakan publik dan peraturan yang dibuat harus berdasarkan pada bukti dari sumber data yang relevan.

Target sasaran Tahun 2025 telah tercapai 100 persen, maka target Tahun 2026 direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan /Penurunan
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	76,42	72,38	4,04

Perbandingan realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 4,04.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	76,42	65	11,42

Perbandingan realisasi sasaran strategis meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi Tahun 2025 dan target akhir renstra adalah sebesar 11,42.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat	Hasil Perbandingan
Meningkatnya praktik baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	76,42	88,89	-12,47

Perbandingan realisasi indikator Nilai RB General Kabupaten Majalengka dengan Nilai RB General Jawa Barat -12,47.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang mempengaruhi peningkatan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Daerah ditunjang oleh kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang mengampu beberapa indikator kinerja utama, salah satunya adalah Nilai LPPD, dan untuk Tahun 2025 Kabupaten Majalengka masih dalam proses penilaian.

Indikator kinerja kunci dari pelaksanaan kegiatan ini adalah predikat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi Indeks RB General. Target Nilai LPPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah mendapatkan predikat Tinggi. Adapun realisasi dan capaian indikator Predikat LPPD belum dapat dianalisa dikarenakan masih dalam proses penilaian di Kementerian Dalam Negeri.

Indikator kinerja kunci kedua dari kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan adalah pemenuhan SPM sesuai ketentuan.

Target dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Dengan demikian maka capaian indikator ini adalah 100%.

b. Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat

Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesejahtraan sosial dan masyarakat. Indikator Kinerja Kunci dari kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah Persentase Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan sesuai ketentuan dengan target 50% dan

Realisasi sebesar 50%. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan seperti pengajian rutin, peringatan

Hari Besar Keagamaan seperti MTQ dan pemberian bantuan berupa hibah untuk 63 lembaga keagamaan. Disamping itu dilaksanakan juga peringatan HUT RI tingkat Kabupaten dan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Majalengka.

Kegiatan lain yang dilaksanakan yang mendukung meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahtraan rakyat adalah dengan adanya rangkaian kegiatan dalam rangka

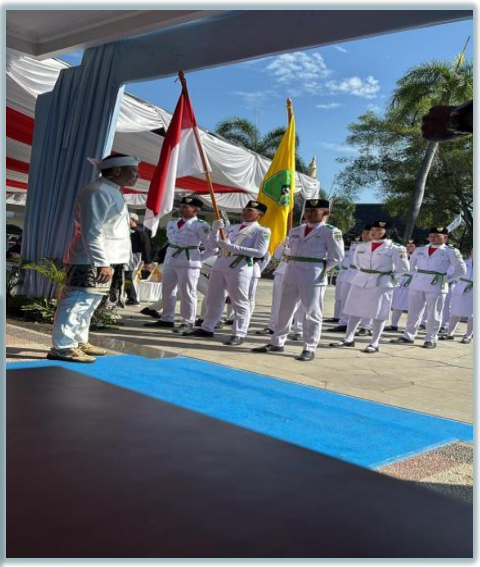

peringatan Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Majalemngka, mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

c. Meningkatkan kualitas reformasi hukum

Reformasi Hukum merupakan sebuah proses atau upaya yang bertujuan untuk memperbaiki, mengubah dan meningkatkan sistem hukum. Bagian sebagai pengampukegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum telah melakukan upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH). IRH sendiri Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas penyusunan produk hukum dan sosialisasi produk hukum. Kegiatan ini juga berkaitan dengan implementasi RANHAM serta tersedianya layanan bantuan hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target Reformasi hukum diantaranya adalah dengan melaksanakan sinkronisasi dalam penyusunan produk hukum serta sosialisasi produk hukum baik melalui JDIH maupun sosialisasi tatap muka. Pembinaan melalui pendampingan desa sadar hukum dan keluarga sadar hukum juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Meningkatnya kualitas reformasi hukum ini dapat dilihat pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) dimana pada tahun 2025 Kabupaten Majalengka mendapat nilai **97,32** dengan predikat **AA (istimewa).**

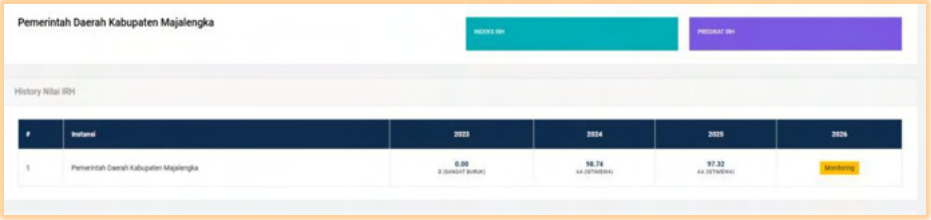

d. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perekonomian

Indikator kinerja kunci dari Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian adalah Kualitas kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukkung tercapainya indikator ini diantaranya adalah pembinaan terhadap BUMD. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadapa pendapatan asli daerah (PAD)kemudian dibentuknya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) serta peresmian hasil pembangunan Kabupaten Majalengka selama Tahun 2025.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa

Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa mempengaruhi capaian indikator Indeks Tata Kelola PengadaanPengadaan Barang dan Jasa (ITKP). Target ITKP pada Tahun 2025 adalah sebesar 72,5 yang terealisasi sebesar 73 atau 0,50 poin melebihi target yang ditentukan. Kegiatan ini jugamempengaruhi level kematangan IUKPBJ, dimana Kabupaten Majalengka sudah meraih level maksimal yaitu 9 level.

Seluruh pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara eloktronik, bsik pengadaan melalui e-purchasing, tendering, maupun e-dasung.

f. Meningkatkan kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Pelaporan

Dalam meningkatkan pelaporan kualitas pemerintah daerah adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target meraih Predikat B. Pada Tahun 2025, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/370/AA.05/2025 Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih predikat **BB** dengan nilai sebesar **75,24**. Hal ini menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"** yaitu implementasi AKIP sangat baik pada pemerintahan daerah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pembukaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknolgi informasi.

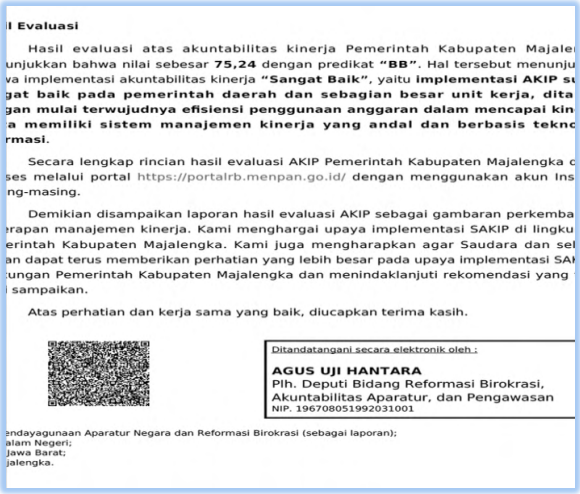
l Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majale
unjukkan bahwa nilai sebesar **75,24** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunju
va implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu **implementasi AKIP su**
gat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, dita
gan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kin
a memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis tekno
rmasi.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka c
ses melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/ dengan menggunakan akun Ins
ng-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkemba
rapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingku
erintah Kabupaten Majalengka. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan sel
an dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SA
ungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan menindaklanjuti rekomendasi yang
sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
alam Negeri;
Jawa Barat;
jalengka.

Pendampingan dalam penyusunan LKIP Perangkat Daerah juga salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Daerah

g. Organisasi Agile

Salah satu tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya organisasi yang sederhana, efektif dan lincah. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Majalengka membawa perubahan dalam sistem kerja. Struktur yang lebih ramping dan memungkinkan terbentuknya sebuah team yang fleksibel dengan menghilangkan sekat-sekatantar intansi sehingga dapat terbentuk sebuah kolaborasi yang bersifat lincah dan efektif.

Pendampingan dalam penyusunan team kerja sekaligus memverifikasi pengajuan team kerja dari seluruh perangkat daerah dan penyusunan pohon kinerja yang sesuai dengan rincian tugas dan tupoksi juga menjadi salah satu fokus dalama mewujudkan organisasi agile.

h. Meningkatkan Perangkat Daerah yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja sederhana

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada perangkat daerah merupakan dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mendorong para pegawai untuk melakukan pekerjaannya

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga kesalahan atau maladministrasi. dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau maladministrasi.

i. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Perangkat Daerah

Kualitas reformasi birokrasi pada perangkat daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi di perangkat daerah sangat mempengaruhi keberhasilan capaian RB General yang merupakan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah. Pada tahun 2025 Bagian Organisasi telah melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas RB di Perangkat Daerah, salah satunya dengan adanya bimbingan teknis dan pendampingan serta pemantaun dalam pengisian masing masing indikator pada aplikasi SURABI jabar 3.0 yang merupakan salah satu aplikasi yang dapat mengukur capaian RB baik RB general maupun RB tematik pada masing-masing perangkat daerah.

j. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerrapkan standar pelayanan publik

Faktor pendukung keberhasilan capaian nilai RB general berikutnya adalah meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa atau pelayanan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Majalengka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat #bangga melayani bangsa# yang merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Penilaian kualitas pelayanan publik perangkat daerah dilaksanakan oleh Ombudsman. Pada tahun 2025 beberapa perangkat daerah yang dinilai diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Majalengka, Puskesmas dan Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dibangun pula Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan pelayanan yang terintegrasi yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Bagian Organisasi juga menyelenggarakan acara Yanlikfest 2.0 pada bulan Desember. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai pelayanan publik pada masyarakat.

k. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum Sekretariat Daerah

Sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas dan pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi umum. Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Bagian Umum dan Bagian Perencanaan Keuangan meraih nilai 86,60 dengan predikat baik. Nilai ini melebihi target yang diperjanjikan yaitu sebesar 85,5.

Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi merupakan salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi umum. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan Sumber Daya yang ada sehingga kekurangan jumlah pegawai secara kuantitas dapat diimbangi dengan kualitas pegawai yang tersedia. Pelayanan terhadap Kepala Daerah selaku pimpinan juga dilaksanakan secara optimal, baik dari segi pemenuhan kebutuhan Rumah tangga Pimpinan, pemeliharaan sarana dan prasarana maupun pelayanan keprotokolan. Tersusunnya dokumen perencanaan juga memegang peranan penting dalam meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum Sekretariat Daerah. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan telah dilaksanakan asistensi penyusunan pohon kinerja dan reviu terhadap Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026. Hal ini bertujuan agar dokumen perencanaan Sekretariat Daerah selaras dengan SOTK dan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah melalui evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta

pelaporan kinerja yang akurat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola administrasi umum. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan melalui aplikasi e-monev Kabupaten Majalengka. Pengukuran kinerja juga dilakukan melalui pengisian realisasi target dan capaian pada aplikasi e-sakip Kabupaten Majalengka.

Penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah melalui penyusunan LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum juga dipengaruhi oleh tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran.

l. Program yang menunjang keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian RB General diantaranya adalah adanya program dan kegiatan yang mendukung capaian IKU Nilai RB General. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.954.287.583,-. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan secara umum sebagai berikut.

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	Rp. 2.436.830.400
		Bagian Hukum	Rp. 646.699.800
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 14.124.880.747
2	Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 993.999.926
		Bagian Pengadaan Barang Jasa	Rp. 856.291.673
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp. 18.938.400.101
		Bagian Umum	Rp. 25.461.287.579
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.791.345.482
		Bagian Organisasi	Rp. 1.287.876.830

m. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai RB General pada sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi yaitu 5,94% atau sebesar Rp. 4.416.675.045 dari pagu anggaran Rp. 70.954.287.583 dengan realisasi Rp. 66,537.612.538,-.

n. Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang

Upaya yang akan dilakukan di Tahun 2026 untuk lebih meningkatkan nilai RB General antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Untuk 2026 Sekretariat daerah akan tetap mempertahankan keberhasilan dengan Predikat LPPD Tinggi, Terevaluasinya Dokumen Pelaporan SPIP PD tercapai 100%. peningkatan ini bertujuan untuk mewujudkan Good Government.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Pada Tahun 2026 Sekretariat Daerah memastikan Kebijakan yang berkualitas harus memberikan dampak (impact) yang nyata bagi kehidupan Masyarakat, Terbinanya Masjid tentang Manajemen Masjid dengan indikatornya tercapai 100%, Tersalurkannya Bantuan Hibah dengan indikatornya tercapai 100%, Tersalurkannya Bantuan Sarana Prasarana melalui Hari Besar Keagamaan dengan realisasi 100%.
3. Meningkatkan kualitas reformasi hukum. Reformasi hukum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Reformasi Birokrasi, menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan nilai RB general. Pada Tahun 2026 Sekretariat Daerah trus meningkatkan tersosialisasinya Produk Hukum, Terbinanya Desa Sadar Hukum, Terbinanya keluarga sadar hukum, Teranalisa dan Terevaluasinya Produk Hukum capai 100% seperti realisasi tahun 2024, 2025 dan mempertahankan nilai IRH dengan Predikat AA(Istimewa) seperti tahun 2024-2025 dengan AA.
4. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perekonomian sehingga memberikan dampak dan manfaat bagi Masyarakat. Dalam hal ini kebijakan untuk

merevitalisasi dan adanya restrukturisasi terhadap BUMD sebagai Badan Usaha yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, pengendalian dan pendistribusian ekonomi juga penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga di Tahun 2026 akan terus melakukan pendampingan ke BUMD untuk meningkatkan PAD dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk menjaga nilai Tingkat Inflasi Daerah.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa. Kualitas pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya faktor Sumber Daya baik itu anggaran maupun SDM para pelaku pengadaan. Dalam hal ini penggunaan anggaran yang efisisen mutlak diperlukan. Pembinaan terhadap para pelaku pengadaan baik itu para penyedia maupun pejabat pengadaan harus dilakukan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku pengadaan sehingga di 2026 Seluruh pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan semua secara eloktronik, baik pengadaan melalui e-purchasing, tendering, maupun e-dasung.
6. Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah khususnya dimensi pelaporan. Pada Tahun 2026 Sekretariat Daerah akan tetap melakukan verifikasi dokumen SAKIP Perangkat Daerah termasuk berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025 dari Kementerian PANRB, selain itu akan mereviu pohon kinerja dan cascading mengacu ke RPJMD 2025-2029 serta mengidentifikasi crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah, menyempurnakan dokumen IKU pada seluruh Perangkat Daerah dengan melengkapi definisi operasional, Reviu LKIP Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas setiap laporan, memastikan

Perangkat Daerah mengisi data master pada aplikasi e-SAKIP, serta Menguraikan catatan dan analisis pada setiap komponen evaluasi. Pada Tahun 2026 juga Sekretariat Daerah melakukan pengembangan aplikasi e-SAKIP dengan memberikan *branding* Masagi "Majalengka SAKIP Terintegrasi.

Kemudian dalam penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Tahun 2025, menambahkan catatan yang menjadi perhatian Kementerian PANRB.

7. Organisasi Agile, di Tahun 2026 Sekretariat Daerah memfasilitasi beberapa Perangkat Daerah yang perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan uraian tugas yaitu DPMD, Disparbud, DKP3 serta DP3AKB.

   Selain itu dalam pemetaan jabatan di Pemerintah Kabupaten Majalengka, di Tahun 2026 secara intens mendampingi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen ANJAB ABK.

8. Meningkatkan Perangkat Daerah yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja sederhana. Sekretariat Daerah di Tahun 2026 mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menunjuk ketua tim kerja pada unit kerjanya yang kemudian di verifikasi oleh Bagian Organisasi. Selain itu akan melakukan penyusunan dokumen Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten yang mengacu RPJMD 2025-2029 serta mendampingi Perangkat Daerah untuk menyusun proses bisnisnya masing-masing. Pada Tahun 2026 juga Sekretariat Daerah menyusun Peraturan Bupati terkait Pakaian Dinas ASN, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Perangkat Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Perangkat Daerah adalah dengan memberikan bimbingan teknis bagi para pejabat Struktural terkait penilaian reformasi birokrasi dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penilaian RB tersebut. Kemudian Sekretariat Daerah akan Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Menginternalisasi pelaksanaan RB Perangkat Daerah kepada evaluator internal bersama Pemprov. Jabar, Sosialisasi pelaksanaan RB Perangkat Daerah dan standar bukti dukung kepada seluruh Perangkat Daerah.

10. Meningkatkan Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan publik. Di Tahun 2026 Sekretariat Daerah akan mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah dengan melakukan sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik instrumen terbaru. Selain itu berkaitan dengan kewajiban dari Kementerian PANRB agar seluruh instansi Pemerintah menggunakan SKM Online, maka dari itu Sekretariat Daerah akan mendorong penggunaan SKM Online ke seluruh Perangkat Daerah.
11. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi umum Sekretariat Daerah. Dalam meningkatkan tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah di Tahun 2026 yaitu meningkatkan realisasi Nilai RB General dan SAKIP Sekretariat Daerah diatas target yang ditentukan dengan minta bimbingan dari Bagian Organisasi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan efisien. Penyediaan sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang kompeten, meningkatkan

SPBE dan mendorong penggunaan Tanda Tangan Elektronik mencapai 100% pada semua naskah dinas untuk meningkatkan efisiensi waktu.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatya Praktik Baik Reformasi birokrasi	Nilai RB General	100%	93,78

04

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat. kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi sudah tercapai melebihi target yang telah ditentukan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sudah sesuai dengan harapan. Akan tetapi masih terdapat beberapa komponen pembentuk nilai RB General yang masih harus ditingkatkan.

Sekretariat Daerah telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai RB General adalah sebesar 5,94% atau Rp 4.416.675.045.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AERON RANDI, AP. MP.**
Jabatan : Sekretaris Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **. Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 27 November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.	**AERON RANDI, AP. MP.** NIP. 19750209 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	73 Nilai

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	50.198.734.818,00	APBD
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	18.491.087.550,00	APBD
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	2.264.465.215,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**70.954.287.583,00**	

Majalengka, 27 November 2025

Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Sekretaris Daerah,

AERON RANDI, AP. MP.
NIP. 19750209 199311 1 002

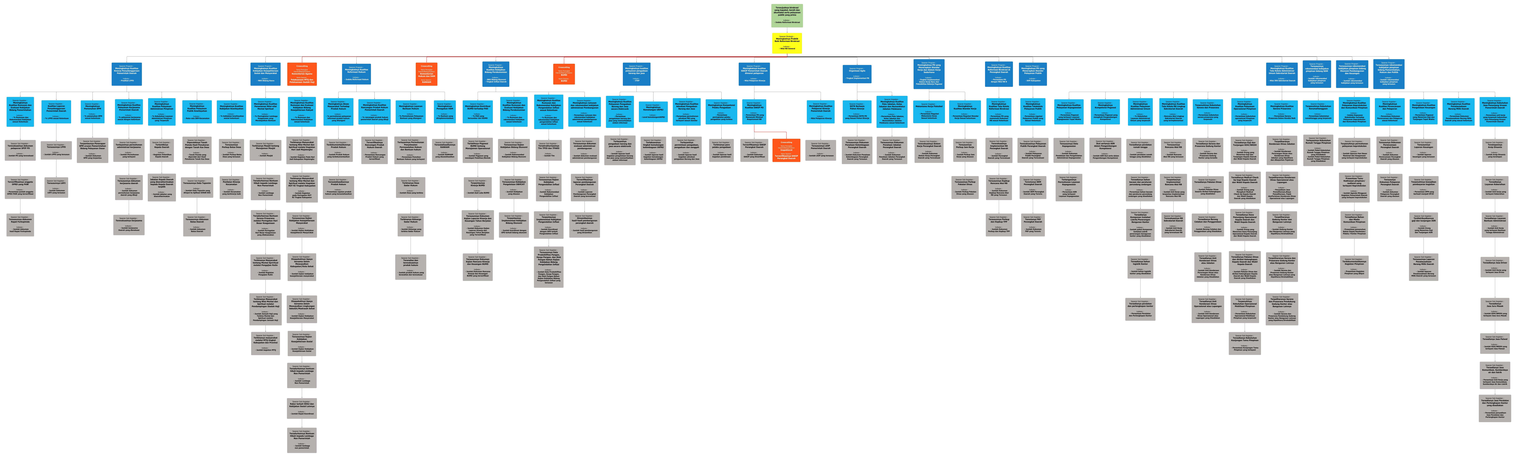

PENYERAHAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KEPADA PIMPINAN

BUKTI SEBAR LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

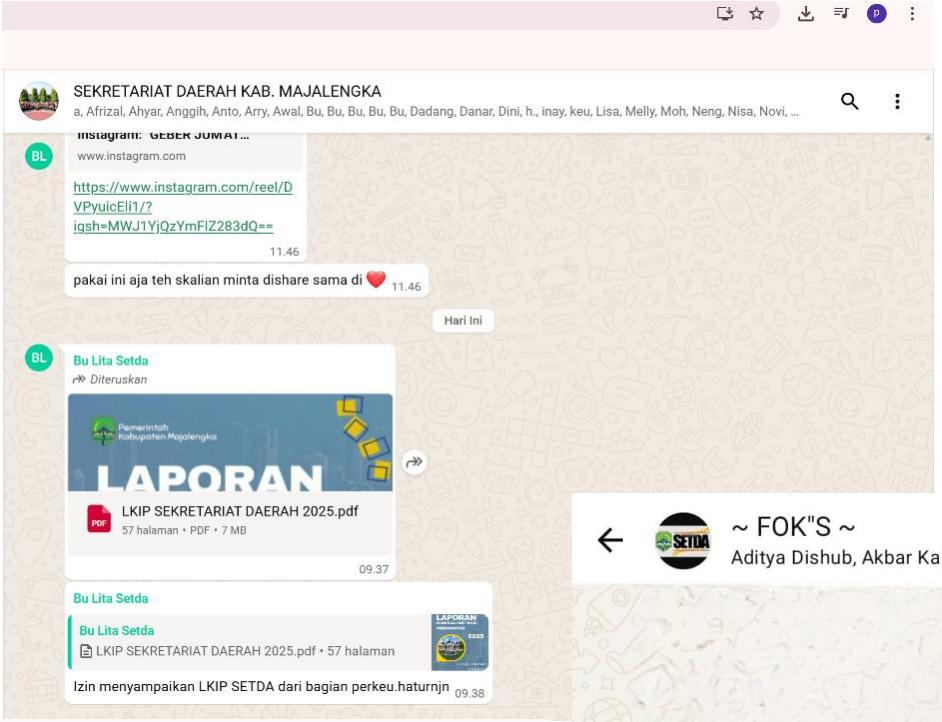

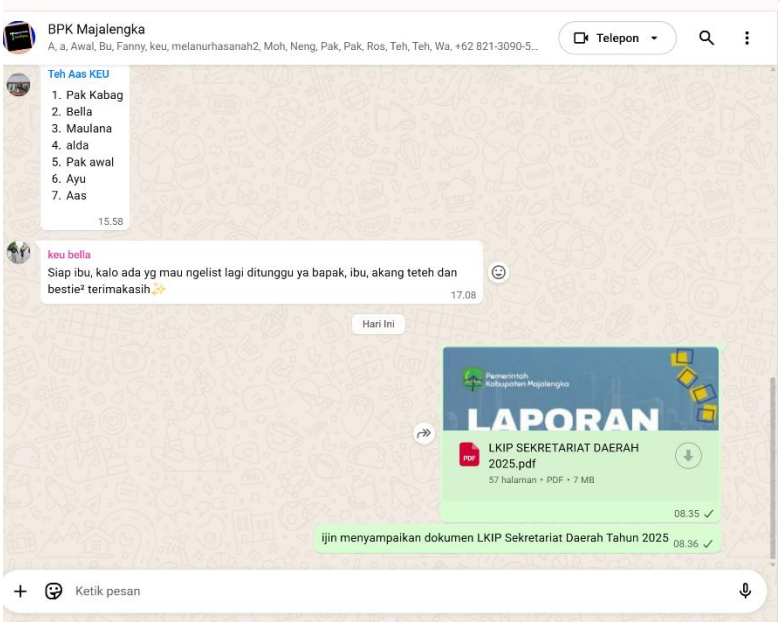

PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2025

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

1

2

BUPATI MAJALENGKA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 500.10.29.11/ 1307 /BKPSDM/2025/M

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

Nama : RIZKIE TURAGUS SHAKTI, S.M.
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 31 Januari 1996
NIP : 199601312022091013
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
Instansi : Sekretariat Daerah

Sebagai

JUARA III

ASN Berprestasi Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Kategori

INOVATIF

Dikeluarkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 November 2025
Bupati Majalengka,

Dra. H. Eman Suherman, M.M

3

PRESTASI PERANGKAT DAERAH

1. JUARA 2 IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH

2. JUARA 3 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

3. JUARA 3 PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 400.14.11/1385/ORG/2025

DIBERIKAN KEPADA :

JUARA III

Sekretariat Daerah

Atas Pelayanan Publik terbaik Kabupaten Majalengka
Kategori Dinas/Badan/RSUD Tahun 2025.

Majalengka, Desember 2025
Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telp. 0233 281022 – 281217
Fax.281475 Majalengka 45418

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3.5 / 09 / Perencaa Keu / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Susunan personalia Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dari seluruh Bagian di Sekretariat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
c. Menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KELIMA : Biaya Kegiatan TIM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat surat keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

AERON RANDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 100.3.3.5/09/perenc & keu/2026
Tanggal : 9 Maret 2026
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025**

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

1.	Pembina	:	Bupati Majalengka
2.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
3.	Koordinator	:	1. Asisten Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4.	Ketua Pelaksana	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5.	Sekretaris	:	Ketua Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah
6.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kepala Bagian Umum 7. Kepala Bagian Organisasi 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 9. Kepala Sub Bagian Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
12. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
13. Kepala Sub Bagian Protokol
14. Ketua Tim Pada Bagian Pemerintahan
15. Ketua Tim pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
16. Ketua Tim pada Bagian Hukum
17. Ketua Tim pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan
18. Ketua Tim pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
19. Ketua Tim pada Bagian Organisasi
20. Ketua Tim pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
21. Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

AERON RANDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 100.3.3.5/9/Perenc & Keu/2026
Tanggal : 9 Maret 2026
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025**

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

1. **Pembina**
   a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
   b. Memberikan arahan dan pembinaan terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
2. **Penanggungjawab**
   a. Memberikan arahan dan penjelasan teknis terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Sekretariat Daerah;
   b. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Sekretariat Daerah;
   c. Bertanggungjawab atas semua data yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Sekretariat Daerah.
3. **Koordinator**
   a. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Asisten;
   b. Membantu Sekretaris Daerah dalam memverifikasi dan melaksanakan validasi atas data yang dikumpulkan terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Asisten.
4. **Ketua Pelaksana**
   a. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
   b. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

c. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 kepada Sekretaris Daerah.

5. Sekretaris

a. Membantu Ketua Pelaksana dalam Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

6. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 lingkup masing-masing bagian.

SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

AERON RANDI

Dipindai dengan CamScanner